

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, isu keberlanjutan telah menjadi fokus utama bagi perusahaan di seluruh dunia, khususnya dalam aspek *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Kesadaran akan pentingnya praktik bisnis yang berkelanjutan semakin meningkat, karena tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga dapat memberikan nilai jangka panjang bagi para pemegang saham. Pengungkapan ESG oleh perusahaan kini menjadi krusial sebagai cara untuk mengomunikasikan komitmen dan kinerja perusahaan dalam keberlanjutan kepada para investor, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Di era globalisasi dan keterbukaan informasi saat ini, pengungkapan ESG tidak lagi menjadi sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan yang didorong oleh regulasi, tekanan dari pemangku kepentingan, dan tuntutan pasar. Investor dan konsumen semakin memperhatikan aspek ESG dalam pengambilan keputusan perusahaan, memaksa perusahaan untuk lebih transparan dalam praktik keberlanjutannya.

Pada tahun 2001, dicetuskannya pelaporan global inisiatif (GRI). Pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan berdasarkan Standar GRI memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya GRI membuat perusahaan semakin sadar untuk dapat melaporkan tanggung jawab sosialnya sehingga dapat mendorong cakupan pelaporan

tanggung jawab sosial yang semakin luas, termasuk di dalamnya informasi mengenai pengungkapan lingkungan dan tata kelola (Sirait dan Fuad, 2020).

Berdasarkan penelitian, bahwa kinerja ESG dan pengungkapan informasi secara efektif dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan perusahaan, efisiensi operasional, dan nilai perusahaan. Sehingga, memberikan tekanan eksternal dan permintaan internal mendorong perusahaan untuk dapat terlibat aktif dalam pengungkapan ESG (Tian et al. 2023). Penelitian dari *Oxford University* tahun 2015 tentang praktik ESG, dari 200 studi akademis, laporan industri, artikel, surat kabar dan buku maka diperoleh hasilnya 88% penelitian menunjukkan bahwa praktik ESG menghasilkan kinerja operasional yang baik dan 80% penelitian menunjukkan bahwa kinerja harga saham perusahaan dipengaruhi secara positif oleh praktik keberlanjutan yang baik (Clark et al. 2015). Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan ESG perusahaan karena dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatnya harga saham perusahaan.

Pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) ada tiga komponen utama, pertama yaitu *Environmental* (lingkungan hidup) yang mencakup aspek terkait polusi, mitigasi, dan keberlanjutan perubahan iklim. Kedua, aspek *social* (sosial), yaitu yang mengarah pada cara suatu organisasi dalam memperlakukan komunitas, karyawan, dan kliennya serta tanggung jawabnya terhadap produk dan layanan, keberagaman, pemberantasan korupsi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia diseluruh rantai pasokan. Komponen

terakhir yaitu *governance* (tata kelola), yang terkait dengan keseimbangan kepentingan pemangku kepentingan dan pemegang saham serta berpegang pada praktik tata kelola perusahaan yang terbaik (Fuadah et al. 2022).

Pemerintah Indonesia juga berupaya dalam membentuk strategi dalam implementasi prinsip – prinsip ESG, seperti komitmen Pasar Modal Indonesia dalam ESG dengan melakukan inisiatif seperti bergabungnya BEI dengan *Sustainable Stock Exchange (SSE)* pada tanggal 18 April 2019 dan melahirkan empat indeks bursa, yaitu Sri Kehati, *IDX ESG Leaders*, *IDX Sector Leaders* *IDX Kehati*, dan *ESG Quality 45* *IDX Kehati*, yang salah satu dari keempat indeks ini bekerja sama dengan *Sustainalytics*, sebuah badan riset ESG dan tata kelola terkemuka. Di Indonesia, OJK telah mengeluarkan kewajiban bagi lembaga jasa keuangan dan emiten untuk membuat laporan keberlanjutan yang terdapat pada peraturan POJK nomor 51/POJK.03/2017 yaitu peraturan OJK yang mengatur tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik di Indonesia guna mendorong pengungkapan keberlanjutan (Market, 2023).

Pemerintah telah berupaya mendorong penerapan ESG, namun masih banyak perusahaan di Indonesia yang belum mengimplementasikannya secara efektif. Hal ini dikarenakan penerapan ESG di Indonesia saat ini masih bersifat sukarela dan belum diatur secara tegas melalui undang-undang atau peraturan pemerintah. Salah satu regulasi yang terkait adalah **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017** tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa

Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Meskipun peraturan ini mewajibkan penyusunan laporan keberlanjutan bagi perusahaan tertentu, penerapan aspek ESG secara keseluruhan masih lebih bersifat anjuran daripada kewajiban hukum. Selain itu, **Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas** mengatur tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) hanya untuk perusahaan yang bergerak di bidang atau terkait dengan sumber daya alam, namun tidak secara khusus mewajibkan pengungkapan ESG secara menyeluruh.

Menurut Achmad Daniri dari Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), tingkat keterbukaan ESG di Indonesia saat ini diperkirakan masih kurang dari 50%. Dibandingkan dengan negara-negara lain, penerapan ESG di Indonesia masih tergolong rendah (Setianda, 2023). Indeks ESG di pasar modal Indonesia hanya menempati urutan ke-36 dari 47 pasar modal di dunia per Maret 2021, dan indeks ini juga berada di bawah Filipina, Singapura, Malaysia, Thailand, dan India (Deha, 2023). Salah satu penyebabnya adalah belum adanya hukuman atau denda tertulis bagi perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan ESG. Saat ini, perusahaan yang tidak mengungkapkan ESG hanya dikenakan sanksi administratif berupa teguran atau teguran tertulis.

OJK juga memberikan insentif kepada Lembaga Jasa Keuangan, emiten, dan perusahaan publik yang menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif, berupa program pengembangan kompetensi SDM, penghargaan keuangan berkelanjutan, dan bentuk insentif lainnya (Sastrawijaya et al. 2023). Sedangkan di negara lain

seperti Amerika Serikat telah menerapkan sanksi atau denda kepada perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan ESG, contohnya Komisi Sekuritas dan Bursa AS tahun 2022 mendenda BNY Mellon Corp. dan Goldman Sachs Group Inc. masing-masing sebesar \$1,5 juta dan \$4 juta, atas kesalahan penyajian ESG dan kegagalan kebijakan dalam unit manajemen investasi perusahaan. Menurut, Edel Brophy, direktur global kepatuhan peraturan di perusahaan regtech Fenargo, ini pertama kalinya regulator mendenda lembaga keuangan atas kegagalan terkait ESG, yang merupakan “a clear message” kepada dunia investasi bahwa Securities and Exchange Commission (SEC) akan menyelidiki klaim greenwashing secara menyeluruh (Wass, 2023).

Pelanggaran pada dimensi ESG di Indonesia masih sering terjadi karena perusahaan kurang memberikan perhatian terhadap isu-isu ESG. Berikut adalah beberapa contoh mengenai pelanggaran ESG seperti yang berkaitan dengan lingkungan, berdasarkan penelitan dari Sungai Watch, Danone menjadi penyumbang terbesar pencemaran lingkungan di Indonesia selama tiga tahun berturut-turut hingga 2023. Berdasarkan data temuan lebih dari 537.000 item sampah produk kemasan bermerek, mencakup saset, botol plastik, plastik keras, gelas sekali pakai, kaleng dan gelas kaca, yang dikumpulkan relawan organisasi nirlaba tersebut di kawasan perairan sungai dan laut di Bali dan Banyuwangi, Jawa Timur, sepanjang tahun 2023 (Nabhani, 2024).

Selain itu pada tahun 2019, PT. Indofood pabrik di perusahaan yang berada di Medan pernah membiarkan limbah berbahaya dan beracun (B3) yang tercecer

dilingkungan pabrik (Effendy, 2019). Sedangkan pelanggaran sosial, contohnya produsen sepatu Adidas, PT Panarub Industri yang bertempat di Tangerang, Banten, diduga melakukan PHK dan memotong upah karyawan secara sepihak. 1.500 karyawan disebut kena PHK, pemotongan upah adalah rata-rata sebesar Rp 800.000 hingga Rp 1.300.000 (Fadhillah, 2023). Terkait dengan isu tata kelola, banyak perusahaan BUMN seperti PT Waskita Karya Tbk (Waskita) dan PT Wijaya Karya Tbk (Wika) yang melakukan manipulasi laporan keuangan (Murwani, 2023). Dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi, akan menyebabkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan akan berkurang atau menurun atas operasi perusahaan sehingga mereka akan menuntut perusahaan untuk dapat lebih transparan dalam mengungkapkan berbagai informasi terutama yang berhubungan dengan kinerja keberlanjutan perusahaan.

Pengungkapan ESG dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya tentang tata kelola atau *corporate governance*. Tata kelola perusahaan dapat menentukan seberapa luas pengungkapan ESG (Jimantoro et al. 2023). Penerapan tata kelola yang baik dapat mendorong perusahaan menjalankan transparansi melalui informasi berkelanjutan (Sirait dan Fuad, 2020). *Corporate Governance*, yang merujuk pada sistem aturan, praktik, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola perusahaan, memegang peranan kunci dalam menentukan sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi terkait ESG. Praktik *Corporate Governance* yang baik diharapkan dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih

besar, termasuk dalam pengungkapan ESG. Hal ini karena struktur *governance* yang kuat dapat memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana perusahaan menangani isu-isu ESG.

Corporate governance merupakan kerangka kerja yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, manajemen, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam sebuah perusahaan. Elemen-elemen *corporate governance* ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam mengungkapkan informasi *environmental, social, and governance* (ESG). Salah satunya adanya *female* atau wanita di dewan direksi dan ukuran dewan direksi, dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengungkapkan informasi ESG. Banyak penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai variabel yang mempengaruhi pengungkapan ESG, mencakup aspek-aspek seperti ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional, dan budaya organisasi. Namun, dalam penelitian ini, peneliti membatasi fokus pada *female director* dan ukuran dewan direksi.

Pemilihan variabel ini mencerminkan dinamika internal perusahaan yang relevan, apalagi di Indonesia menganut *two tier system* berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berlaku di Indonesia, karena di Indonesia memisahkan kewenangan pengurusan perusahaan dan pengawasan yang selama ini dikenal dengan Dewan Direksi yang tugasnya menjalankan pengurusan perusahaan dan Dewan Komisaris lebih bersifat melakukan pengawasan. Maka pada

penelitian ini hanya berfokus pada *female director* dan ukuran dewan direksi agar dapat mencerminkan dinamika internal perusahaan yang relevan yang diharapkan memiliki dampak signifikan terhadap pengungkapan ESG.

Keberagaman gender dalam struktur dewan direksi mengacu pada keberagaman gender diantara anggota dewan. Keberagaman gender dalam kepemimpinan korporat dianggap penting untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan mendukung keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk pengungkapan ESG (*Environmental, Social, and Governance*). Adanya wanita di dewan direksi ini diharapkan dapat mempengaruhi perspektif dan keputusan manajemen, membawa pandangan yang lebih luas dan inovatif yang mendukung praktik bisnis yang berkelanjutan dan inklusif.

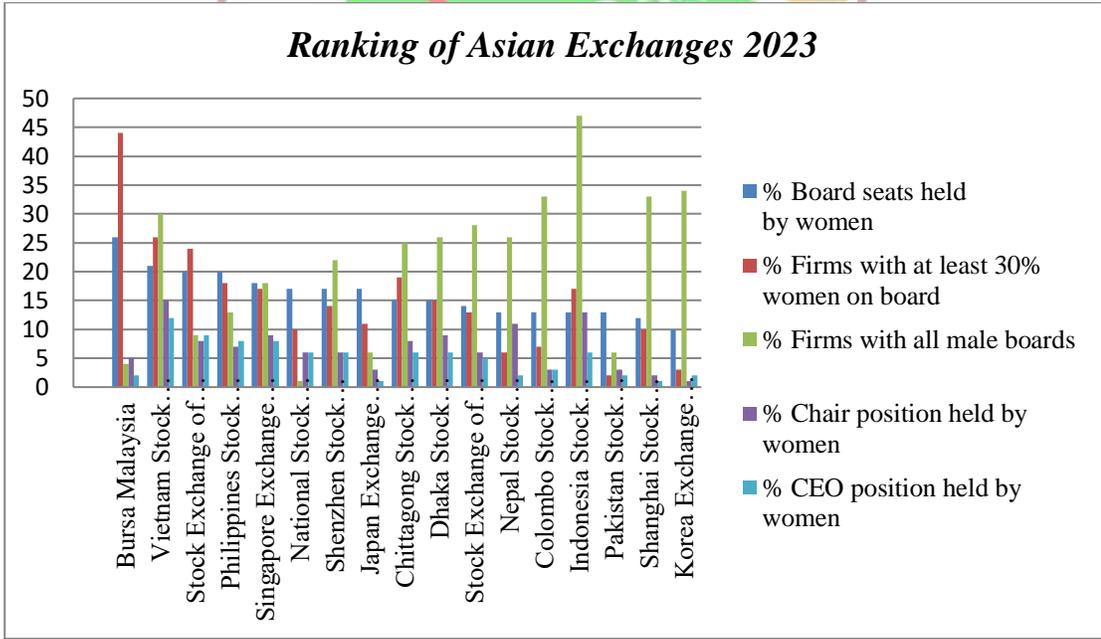
Berdasarkan teori pemangku kepentingan (*Stakeholder Theory*) menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham tetapi juga kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam operasi perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, komunitas, dan lingkungan. Pengungkapan ESG adalah salah satu cara di mana perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan memperhitungkan kepentingan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dalam hal, keberagaman di dalam dewan direksi, terutama keterwakilan wanita, menjadi faktor penting. Beberapa studi menunjukkan bahwa wanita di dewan direksi cenderung lebih sensitif terhadap isu-

isu sosial dan lingkungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas dan cakupan pengungkapan ESG.

Perusahaan dengan direktur wanita akan menunjukkan perilaku yang berbeda terkait dengan pengambilan keputusan investasi yang mempengaruhi kinerja keuangan secara signifikan dimana laki-laki lebih percaya diri tetapi wanita lebih konservatif dan berhati-hati (Zhou, 2019). Dengan adanya keterlibatan perempuan dalam manajemen puncak struktur organisasi di dewan direksi akan mengarah pada peningkatan pelaporan keuangan konservatif dan penurunan agresivitas pajak (Khlif dan Achek, 2017). Keberadaan perempuan dalam dewan direksi di perusahaan dapat meningkatkan efektivitas dewan dengan mengurangi tingkat konflik dan meningkatkan kualitas kegiatan yang dapat mempengaruhi fungsi dan keputusan dewan, seperti dalam kasus pengungkapan sukarela ESG (Oktafiyani et al., 2024). Sehingga diharapkan dengan adanya *female* di dewan direksi dalam suatu perusahaan dapat meningkatkan pengungkapan *environmental, social, and governance* (ESG) pada perusahaan tersebut.

Data dari laporan "*Gender Equality in Corporate Leadership Asia 2023*" menyatakan bahwa rata-rata, perempuan menempati 16% kursi dewan direksi, 7% posisi ketua dewan direksi, dan 5% posisi CEO di seluruh kawasan Asia. Dapat dilihat pada gambar 1 dibawah, Indonesia pada Bursa Efek Indonesia (IDX) kedudukan perempuan (% *Chair position held by women*) menonjol urutan kedua dari negara Vietnam dengan 13% kursi dewan direksi dipegang oleh perempuan,

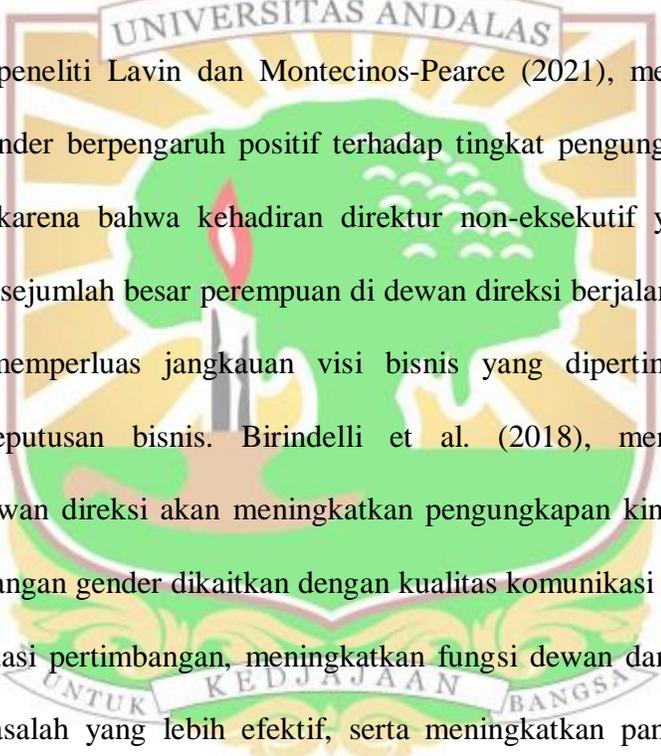
menempatkan Indonesia di posisi yang relatif baik dalam hal keberagaman gender di tingkat kepemimpinan korporat dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Tetapi di Indonesia berdasarkan pada data perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia (IDX) persentase perusahaan dengan semua dewan direksi laki-laki (*firms with all male boards*) menjadi posisi dengan urutan teratas dengan 47% di Asia dan persentase kursi dewan direksi yang di pegang oleh perempuan (*% Board Seats Held By Women*) di Indonesia menjadi urutan empat terbawah dari 17 negara di Asia dengan persentase 13% (*United Nation Sustainable Stock Exchanges, 2023*).



Gambar 1.1 Ranking of Asian Exchanges 2023

Dari data diatas menandakan bahwa keberagaman gender di Indonesia masih rendah karena masih banyak dewan direksi yang didominasi oleh laki-laki. Penelitian yang membahas hubungan antara adanya wanita dalam komposisi dewan direksi

diantaranya peneliti Husted dan Sousa-Filho (2019), keberagaman gender berdampak negatif bagi pengungkapan ESG karena kurangnya jumlah massa yang kritis bagi perempuan di dewan untuk memberikan dampak positif terhadap pengungkapan LST. Peneliti Sirait dan Fuad (2020) keberagaman gender berdampak negatif bagi pengungkapan ESG karena masih sedikitnya proporsi direksi perempuan dalam jajaran sehingga belum mampu mempengaruhi pengambilan keputusan.



Sedangkan peneliti Lavin dan Montecinos-Pearce (2021), mengatakan bahwa keberagaman gender berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan indikator-indikator ESG karena bahwa kehadiran direktur non-eksekutif yang lebih besar bersama dengan sejumlah besar perempuan di dewan direksi berjalan pada jalur yang sama dengan memperluas jangkauan visi bisnis yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis. Birindelli et al. (2018), mengatakan bahwa keberagaman dewan direksi akan meningkatkan pengungkapan kinerja ESG karena dengan keseimbangan gender dikaitkan dengan kualitas komunikasi yang lebih tinggi dapat memfasilitasi pertimbangan, meningkatkan fungsi dewan dan mengarah pada penyelesaian masalah yang lebih efektif, serta meningkatkan pandangan strategis dewan.

Hal ini sangat penting ketika pengambil keputusan harus mencapai kesepakatan mengenai isu-isu kompleks atau memproses informasi yang kompleks sehingga meningkatkan kinerja perusahaan dan strategi perusahaan. Berdasarkan beberapa penelitian mengenai wanita di dewan direksi terdapat adanya inkonsisten hasil dari

beberapa penelitian mengenai pengaruh *female director* terhadap pengungkapan ESG. Penelitian mengenai adanya wanita di dewan direksi juga dapat memperluas cakupan pandangan dan pengalaman, sehingga dapat mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan isu-isu ESG, termasuk keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Selanjutnya elemen-elemen *corporate governance* yang mempengaruhi pengungkapan ESG yaitu ukuran dewan direksi. Dewan direksi adalah salah satu aspek terpenting dari mekanisme tata kelola perusahaan untuk memastikan perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Komposisi atau ukuran dewan direksi merujuk pada jumlah dan karakteristik anggota dewan. Karakteristik dewan direksi bisa diidentifikasi melalui beberapa faktor, seperti ukuran, frekuensi rapat, keberagaman gender, dan tingkat independensinya.

Berdasarkan teori agensi (*Agency Theory*) yang berfokus pada hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen), di mana konflik kepentingan sering kali muncul ketika manajer bertindak untuk kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan pemilik. Pengungkapan ESG dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham, serta untuk memastikan bahwa kepentingan pemangku kepentingan lainnya juga dipertimbangkan. Dalam hal ini, ukuran dewan direksi dapat berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen dan memastikan transparansi yang lebih besar dalam pelaporan ESG.

Dewan yang lebih besar atau memiliki komposisi yang lebih beragam cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan keahlian untuk mengelola risiko dan memperhatikan isu-isu ESG. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi, semakin baik kinerja dalam hal lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), karena keberagaman keahlian yang lebih banyak akan terwakili dalam dewan direksi. Dewan direksi yang lebih besar akan dipimpin oleh direktur dengan keterampilan dan sikap yang berbeda, termasuk direktur yang memiliki kecenderungan kuat terhadap budaya keberlanjutan.

Selain itu, dewan direksi yang lebih besar melakukan aktivitas pengawasan dengan lebih efektif, mendorong perbandingan pandangan, visi tujuan strategis yang lebih luas dan juga mendorong manajemen untuk mendukung kinerja non-keuangan (Birindelli et al. 2018). Keberagaman ini diyakini dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi serta jumlah informasi yang diungkapkan. Peneliti Menicucci dan Paolucci (2022), mengungkapkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja ESG karena ukuran dewan direksi yang besar akan mencakup direktur yang memiliki keahlian LST dan minat yang besar terhadap budaya keberlanjutan.

Selain itu, ukuran dewan yang besar dapat mewujudkan kegiatan pengawasan dengan lebih sukses, menginspirasi visi tujuan strategis yang lebih luas, dan dari perspektif ini, serta mendorong manajemen untuk mengembangkan kinerja keberlanjutan. Penelitian lain mengatakan ukuran dewan direksi tidak berpengaruh

pada pengungkapan ESG karena kurangnya keahlian direksi dalam ESG membuat gagal untuk memahami praktik ESG yang mendorong untuk mengabaikan kinerja keberlanjutan yang berdampak pada pengungkapan informasi keberlanjutan, seperti ESG. Selain itu, Indonesia menerapkan *struktur two-tier system* yang membagi tugas dan kewenangan direksi melalui RUPS sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007. Keputusan direksi harus sejalan dengan Rapat Umum Pemegang Saham, yang membatasi kewenangan dewan direksi (Sirait dan Fuad, 2020).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan ESG adalah *Digital Transformation* (Tranformasi Digital). Di era ekonomi digital, transformasi digital merupakan jalan penting bagi pengembangan perusahaan yang berkualitas tinggi baik pada aspek operasional maupun strategi perusahaan. Penerapan cloud computing, big data, artificial intelligence, blockchain dan teknologi digital generasi baru lainnya dapat secara efektif mempercepat transformasi digital perusahaan, meningkatkan integrasi dan pemrosesan informasi di perusahaan (X. Yang dan Han, 2024).

Transformasi digital perusahaan juga dapat secara efektif meningkatkan efisiensi alokasi faktor sumber daya perusahaan, meningkatkan kemampuan inovasi teknologi dan pengendalian risiko perusahaan, dan pada akhirnya secara signifikan meningkatkan tingkat nilai perusahaan. Beberapa tahun terakhir inovasi teknologi berkembang dengan cepat. Inovasi dalam bidang teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk beralih dari cara tradisional menuju digitalisasi yang dapat

meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan dengan meminimalkan biaya operasional. Penelitian mengenai *digital transformation* terhadap pengungkapan ESG merupakan penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Dengan adanya transformasi digital dapat mendukung dan mempermudah perusahaan dalam mengimplementasikan dan melaporkan praktik ESG perusahaan.

Penelitian yang membahas hubungan antara *Digital Transformation* dengan pengungkapan ESG, yaitu penelitian menurut Li et al. (2024), menunjukkan bahwa transformasi digital secara signifikan meningkatkan kinerja LST karena mendorong penerapan alat-alat digital dalam memantau dan melaporkan metrik ESG dengan menawarkan insentif bagi perusahaan yang menunjukkan penggunaan teknologi yang efektif dalam meningkatkan upaya keberlanjutan perusahaan. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa transformasi digital mempunyai dampak positif terhadap kinerja ESG perusahaan, terutama bagi perusahaan-perusahaan teknologi tinggi dan perusahaan-perusahaan milik Negara karena transformasi digital terhadap penciptaan nilai perusahaan, termasuk mendorong inovasi perusahaan, meningkatkan produktivitas dan kinerja keuangan (P. Yang et al. 2024).

Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol dalam memperjelas hubungan variabel independent dengan variabel dependent. Dalam memilih variabel kontrol ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengungkapan *environmental, social, and governance* (ESG) yang dilakukan oleh peneliti Sirait dan Fuad (2020), Arayssi et al. (2020) dan Kumar et al. (2022), menggunakan ukuran

perusahaan, *leverage* dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Perusahaan yang lebih besar akan memberikan informasi yang lebih baik untuk kepentingan investasi, karena perusahaan yang besar akan lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga dalam melakukan pelaporan akan lebih berhati-hati. Tuntutan *stakeholder* untuk mendapatkan informasi secara transparan akan semakin banyak ketika perusahaan semakin besar. *Leverage* merupakan perbandingan antara dana yang diperoleh dari ekstern perusahaan dengan dana yang dimiliki oleh perusahaan.

Leverage memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang lebih besar memiliki permintaan yang lebih besar dari kreditor untuk pengungkapan informasi. Profitabilitas merupakan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba demi meningkatkan nilai pemegang saham. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka perusahaan cenderung melaksanakan dan mengungkapkan program tanggung jawab sosialnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu “**Pengaruh *Female Director*, Ukuran Dewan Direksi dan *Digital Transformation* Terhadap Pengungkapan *Environmental, Social,***

And Governance (ESG) pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 -2023.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *female director* berpengaruh terhadap pengungkapan *environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2023?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2023?
3. Apakah *digital transformation* berpengaruh terhadap pengungkapan *environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi pengaruh *female director* terhadap pengungkapan *environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2023.

2. Untuk mengidentifikasi pengaruh ukuran dewan direksi terhadap pengungkapan *environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2023.
3. Untuk mengidentifikasi pengaruh *digital transformation* terhadap pengungkapan *environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk dunia akademik sebagai tambahan referensi, khususnya mengenai pengaruh *female director*, ukuran dewan direksi, dan *digital transformation* terhadap terhadap pengungkapan *environmental, social, and governance (ESG)* pada perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2023.

- Bagi Investor

Penelitian diharapkan mempunyai manfaat bagi investor, pengungkapan *Environmental, Social, And Governance (ESG)* perusahaan sebagai bahan pertimbangan ketika akan berinvestasi di perusahaan yang terdaftar di BEI.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan bahwa elemen-elemen *female director*, ukuran dewan direksi, dan *digital*



transformation dapat mempengaruhi tingkat dan kualitas pengungkapan *Environmental, Social, And Governance (ESG)* perusahaan.

1.5 Sistematika Penelitian

Secara umum, analisis penelitaian ini terdiri dari lima bab yang dijelaskan pada sistematika berikut ini:

Bab I : Pendahuluan

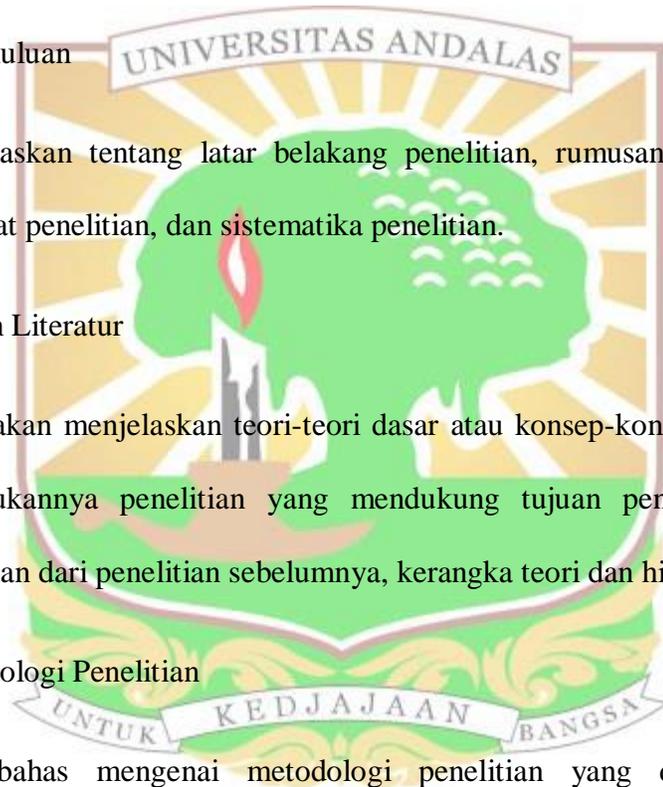
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Tjauan Literatur

Dalam bab ini akan menjelaskan teori-teori dasar atau konsep-konsep yang menjadi landasan dilakukannya penelitian yang mendukung tujuan penelitian. Terdapat tinjauan penelitian dari penelitian sebelumnya, kerangka teori dan hipotesis.

BAB III: Metodologi Penelitian

Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisa masalah, dibab ini terdapat desain penelitian, populasi, sampel, metode pengumpulan data, dan metode untuk menganalisa data.



BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan mengenai deskripsi tentang objek penelitian, analisis data dan menginterpretasi hasil penelitiannya.

BAB V: Penutup

Pada bab ini penulis akan menjelaskan kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan rekomendasi yang diberikan peneliti untuk pihak-pihak yang terkait.

